

REKOMENDASI MUNAS I LTMI

Rekomendasi Internal

1. Lokakarya Pendidikan dan Latihan LTMI

(Training Lembaga)

Bagi HMI setiap aktivitas adalah proses perkaderan begitu juga dengan LTMI sebagai lembaga profesinya HMI maka setiap aktivitas LTMI dimaknai sebagai bagian dari proses perkaderan menuju kader muslim intelektual dan profesional.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan tentu tidak hanya dalam batas diskursus semata melainkan mesti dirumuskan untuk kemudian rumusan tersebut direalisasikan dalam program-program pendidikan dan latihan. Seperti halnya dengan HMI sebagai organisasi induk yang memiliki konsepsi perkaderan secara detail berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maka LTMI sebagai lembaga profesinya HMI sudah sepantasnya memiliki program pendidikan dan pelatihan secara detail agar tujuan pencetakan kader profesional dapat tercapai.

Berdasarkan reasoning di atas maka sangat mendesak penyusunan program pendidikan dan latihan LTMI yang dapat dilaksanakan dalam bentuk Lokakarya Pendidikan dan latihan LTMI.

2. Badan Usaha

Lembaga kekeayaan sebagai badan khusus HMI memiliki peran strategis bagi pengembangan potensi kader seperti yang tertuang dalam ART HMI. Terkait dengan itu Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam sebagai salah satu lembaga yang mewadahi profesi keteknikan memiliki dua peran yang mesti direalisasikan untuk menuju sebagai sebuah lembaga profesional.

Dua peran yang dimaksud di atas adalah, LTMI sebagai sebuah lembaga keteknikan menjadi tempat bagi kader dalam mengembangkan disiplin ilmunya. Sementara itu sebagai sebuah lembaga profesional LTMI pun mesti mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi secara mandiri terlebih dengan nilai tambah berupa spesialisasi ilmu yang dimiliki para kader lembaga.

Untuk memenuhi kebutuhan lembaga secara mandiri maka perlu adanya perencanaan secara matang. Pada tahapan berikutnya perencanaan tersebut direalisasikan dalam bentuk usaha real.

Berbicara usaha maka perlu wadah sebagai alat gerak pengembangannya. Maka kehadiran institusi usaha menjadi persoalan penting yang harus direalisasikan oleh Pengurus LTMI.

Institusi yang dimaksud mesti fleksibel dalam geraknya, tidak kapitalis tetapi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sehingga 5 kualitas Insan Cita selalu menjadi pegangan dalam menjalankan usaha. Pada akhirnya persandingan kepentingan dan nilai senantiasa terjaga dalam aktualisasi gerak lembaga. dengan demikian institusi usaha yang memenuhi standarisasi tersebut adalah koperasi.

3. Kerjasama Antar Lembaga Internal

Kerjasama antara LTMI dengan lembaga intern lainnya pada tingkatan cabang maupun pada tingkatan PB HMI diperlukan dalam rangka memperkuat jaringan internal HMI

4. Perumusan Peran Lembaga kekaryaan

Sejalan dengan semangat pengembangan profesionalisme kader maka perlu revisi perumusan peran lembaga kekaryaan agar selalu up to date mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang diinginkan. Bakornas sebagai wadah nasional perlu lebih mengedepankan profesionalisme dalam mengantisipasi tantangan ke depan dan berupaya untuk selalu melakukan koordinasi dengan tingkat cabang khususnya untuk merespon berbagai perkembangan yang ada.

5. Mengusulkan untuk pembubaran Bidang Kekaryaan PB-HMI diganti dengan sistem Presidium Lembaga Kekaryaan

6. Adanya event yang memungkinkan adanya eksistensi dan memperkuat jaringan LTMI

7. Temu nasional tiap tahun, minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan

8. Laksus II minimal satu kali dalam masa kepengurusan

9. Mendorong terbentuknya jaringan komunikasi antar alumni yang berbasis sains dan teknologi

Rekomendasi Eksternal

1. Teknologi

Kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pemerataan menghasilkan derivasi kebijakan lanjutan yang tentu saja sejalan dengan paradigma pembangunan yang melatarinya.

Sehingga dalam tataran taktis pemerintah sangat berpihak pada pengusaha kuat. Dalam kaitan dengan teknologi, usaha-usaha besar cenderung menggunakan “high tech” sehingga dalam kebijakan pun high tech lebih dikedepankan.

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sebagai bagian dari krisis ekonomi global memberikan fakta lain ternyata pengusaha-pengusaha besar yang begitu dimanjakan akhirnya jatuh dan berdampak fatal bagi negara karena pengusaha tersebut menyisakan hutang yang menggelembung akibat terpuruknya nilai tukar rupiah hingga saat pemerintahan Gus Dur fakta di atas menyisakan derivasi masalah yang berkepanjangan akibatnya perekonomian jalan di tempat walau ini bukan menjadi satu-satu penyebab

Sementara itu usaha-usaha kecil tetap tidak terpengaruh dan tahan banting dengan krisis ekonomi yang berubah menjadi krisis multi dimensional tersebut. Bahwa sebetulnya ada celah lain yang dapat dikembangkan dalam menata ekonomi bangsa ini. Tentu celah itu mesti ditindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas dan berpihak pada pengembangannya.

Untuk pengembangan usaha tersebut satu sisi yang mesti diperhatikan adalah menyangkut penggunaan teknologi yang nota bene lebih sederhana praktis dan murah dalam pemakaiannya.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diseriusi dalam pengembangan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan tersebut:

Pertama, Sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan maka untuk mensinergikannya maka mesti dikembangkan teknologi kerakyatan untuk memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan serta memiliki daya saing pada pasaran yang lebih luas.

Kedua, Untuk menjawab kebutuhan teknologi kerakyatan tersebut maka perlu untuk membangun sebuah pusat penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan secara luas.

Ketiga, Mendesak kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan pengembangan teknologi kerakyatan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan serta pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan.

2. Kelautan

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar, baik berupa potensi perikanan, tumbuhan laut, wisata laut dan sekian potensi lainnya yang masih terpendam. Hanya saja kebijakan pembangunan selama ini lebih berorientasi pada pembangunan wilayah daratan sehingga potensi laut menjadi terabaikan.

Menyadari kenyataan, maka sudah saatnya pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan potensi laut secara optimal sebagai salah satu bentuk recovery ekonomi nasional dalam jangka pendek sedang dalam jangka panjang sebagai proses berkesinambungan pembangunan bangsa . Maka ada empat hal yang mesti segera dilakukan oleh pemerintah yaitu :

Pertama, Terkait dengan besarnya potensi laut Indonesia maka pemerintah mesti melakukan penelitian kekayaan potensi laut Indonesia di semua wilayah secara komprehensif dan integratif.

Kedua, Sebagai salah satu acuan pengembangan potensi kelautan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat maka perlu dilakukan penelitian atas aktifitas nelayan di sentra-sentra produksi perikanan dan pemanfaatan potensi laut yang telah ada.

Ketiga, Pemanfaatan potensi laut secara optimal, berorientasi kemasyarakatan dan berwawasan lingkungan hanya dapat dicapai dengan melakukan strategi perencanaan pemanfaatan dan pengembangannya secara terpadu dan konsisten.

Keempat, Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah dan potensi yang ada di dalamnya maka pemerintah harus melakukan pengamanan wilayah laut secara terpadu dari gangguan pihak-pihak asing serta melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran dan ancaman tersebut.

2. Energi

Masalah besar yang menanti bangsa-bangsa dunia yang mulai muncul lagi adalah pemenuhan kebutuhan energi. Dan pandangan sistem energi konvensional -yang selama ini berlaku di sebagian besar negara, yaitu memperoleh lebih banyak energi dari sumber mana saja, dan berapapun harganya, menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi dan terus-menerus pada bahan bakar minyak. Minyak bumi mendominasi 54 persen penggunaan energi di Indonesia. Gas dan batubara yang ketersediannya melimpah, dengan jumlah cadangan yang mencukupi untuk 61 tahun ke depan (gas) dan cadangan batubara yang dapat habis sampai 147 tahun lagi, dapat menjadi pilihan untuk mengatasi krisis energi yang kerap kali terjadi. Sebagai sumber energi alternatif, gas dan batubara dimasa mendatang akan lebih memegang peranan penting sekaligus menggusur dominasi penggunaan energi minyak selama ini.

Menyadari itu, maka Pemerintah Indonesia harus segera bertindak dan mengambil langkah-langkah kebijakan :

- Pertama;** Kebijakan energi konvensional yang berorientasi terhadap keamanan energi (the energy security), berimbas pada kelangkaan sumber minyak, sebagai akibat laju eksploitasi minyak yang demikian cepat, harus segera diakhiri dengan secepatnya beralih ke sistem energi modern yang berbasis pada penghematan/efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan.
- Kedua;** Untuk memulai masa transisi sambil menyiapkan diri lebih cepat ke sistem energi modern serta menghindari adanya *disruption* dalam penyediaan energi nasional, maka pemerintah harus mendorong secara optimal bagi pemanfaatan batu bara dan gas alam Indonesia

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Keterbelakangan yang dialami masyarakat Indonesia tidak terlepas dari lambatnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Akibat yang ditimbulkan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan kemasyarakatan. Potensi-potensi

strategis dan komoditas unggulan daerah tidak tereksplorasi secara optimal sehingga permasalahan pasar dan standar mutu menjadi probem besar sebageian masyarakat kelas menengah kebawah, petani, nelayan dan kelompok usaha kecil menengah/UKM dalam menghadapi persaingan global.

Untuk itu, maka Pemerintah Indonesia harus segera bertindak dan mengambil langkah-langkah kebijakan strategis :

- Pertama;** Kebijakan memasyarakatkan TIK harus menjadi prioritas utama dalam pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat dan bagi penguatan struktur ekonomi kerakyatan, terutama bagi sektor yang mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi yaitu sektor pertanian-kehutan dan kelautan.
- Kedua;** Segera canangkan Gerakan Desa Pinter (Desa dengan jaringan Komputer dan Internet) untuk mendukung informasi pasar dan komoditas masyarakat dan UKM.